

ANALISIS KONFLIK SOSIAL DAN AGAMA DI TOLIKARA: PENDEKATAN MULTIDIMENSIONAL DALAM IMPLEMENTASI PANCASILA DAN PENYELESAIAN KONFLIK

Yulia Isfahani; Amanda Dwi Pebriliani; Ratu Shaly Maritza; Universitas Pasundan. ratushalyy@gmail.com

Abstrak

Kode Etik, Notaris, Pelanggaran, Undang-undang, Pemalsuan Akta Otentik. Konflik yang terjadi di Tolikara, Papua, pada 17 Juli 2015, dipicu oleh ketegangan antara kelompok agama, khususnya terkait dengan pelaksanaan ibadah shalat Idul Fitri dan protes yang dilancarkan oleh kelompok yang diduga berasal dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) terkait penggunaan pengeras suara. Insiden tersebut berkembang menjadi kerusuhan yang melibatkan pelemparan batu, tindakan represif aparat keamanan, serta pembakaran kios dan mushola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab konflik, pendekatan yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks peristiwa tersebut. Dengan menggunakan metode studi literatur dan pendekatan normatif empiris, penelitian ini mengidentifikasi bahwa konflik di Tolikara bersifat multidimensional, melibatkan faktor agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, serta kegagalan dalam mengimplementasikan nilai-nilai pluralisme, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman Pancasila merupakan akar masalah utama. Teori pluralisme agama, moderasi, keadilan distributif, multikulturalisme, dan demokrasi deliberatif menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis dialog antar kelompok untuk mengatasi ketimpangan sosial dan mewujudkan keadilan. Kesimpulannya, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan multikultural, pemberdayaan masyarakat lokal, dan reformasi sistem hukum untuk menciptakan kedamaian yang berkelanjutan serta memperkuat hubungan antar kelompok di Papua.

Kata kunci: Tolikara, Papua, Pancasila.

Abstract

The conflict that occurred in Tolikara, Papua, on July 17, 2015, was triggered by tensions between religious groups, particularly related to the implementation of the Eid prayer and protests launched by a group suspected of being from the Gereja Injili di Indonesia (GIDI) regarding the use of loudspeakers. The incident escalated to involve stone-throwing, repressive actions by security forces, and the burning of kiosks and prayer rooms. This study aims to analyze the factors causing the conflict, relevant approaches to resolving the problem, and applying Pancasila values in the incident context. Using the literature study method and the empirical normative approach, this study found that the conflict in Tolikara

2 | ANALISIS KONFLIK SOSIAL DAN AGAMA DI TOLIKARA: PENDEKATAN MULTIDIMENSIONAL DALAM IMPLEMENTASI PANCASILA DAN PENYELESAIAN KONFLIK

was multidimensional, involving religious, social, cultural, political, and economic factors, and weak law enforcement. The analysis results indicate that social injustice, economic inequality, and failure to implement the values of pluralism, social justice, and respect for Pancasila diversity are the main root causes. The theories of religious pluralism, moderation, distributive justice, multiculturalism, and deliberative democracy underline the importance of an inter-group dialogue-based approach to address social inequality and achieve justice. In conclusion, a holistic approach that includes multicultural education, local community empowerment, and legal system reform is needed to create sustainable peace and strengthen inter-group relations in Papua.

Keywords: Tolikara, Papua, Pancasila.

I. PENDAHULUAN

Kasus Tolikara yang terjadi pada 2015 merupakan salah satu peristiwa besar yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia, khususnya terkait konflik berbasis agama dan budaya di wilayah Papua. Pada saat itu, terjadi kerusuhan di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, yang bermula dari ketegangan antarkelompok masyarakat berlatar belakang agama berbeda, yakni umat Muslim dan umat Kristen setempat. Kerusuhan yang menyebabkan satu orang meninggal dan belasan terluka karena tembakan aparat; serta puluhan kios dan sebuah mushola di dekatnya dibakar (menurut satu versi, mushola bukan target utama tapi ikut terbakar) (CRSC.2015). Kasus ini menjadi simbol dari kompleksitas pengelolaan keberagaman di Indonesia, terutama dalam konteks wilayah Papua, yang selama ini menghadapi berbagai tantangan struktural seperti

marginalisasi, ketidakadilan sosial, dan ketimpangan pembangunan.



(Sumber: www.aktual.com)

Pada 17 Juli 2015, kerusuhan terjadi di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, yang bermula dari ketegangan terkait pelaksanaan ibadah shalat Idul Fitri. Kelompok masyarakat yang diduga berasal dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) mendatangi Mushola Baitul Mustaqin untuk memprotes penggunaan pengeras suara yang dianggap mengganggu acara ibadah mereka. Insiden ini memuncak ketika terjadi pelemparan batu oleh massa yang kemudian dibalas oleh tindakan represif aparat keamanan. Dalam situasi yang semakin tidak terkendali, massa membakar beberapa kios di sekitar lokasi, dan

api merembet hingga menyebabkan mushola terbakar.

Tabel 1. Dampak dari Konflik terkait peristiwa Tolikara

Aspek Dampak	Jumlah	Keterangan
Korban Jiwa	1 Anak	Tewas akibat tembakan
Korban Luka-luka	11 orang	Luka akibat kerusuhan
Bangunan Terbakar/Rusak	1 Mushola terbakar, 63 Kios Rusak	Mushola digunakan untuk shalat Idul Fitri, kios-kios merupakan milik warga.
Warga Mengungsi	± 400 Orang	Sebagian kehilangan tempat tinggal dan usaha.
Penyebab Utama	Lemahnya Pengel	Dinilai sebagai faktor

	olaan Kerukunan Umat Beragama	yang memperburuk konflik di wilayah tersebut.
--	-------------------------------	---

(Sumber : Laporan Pemantauan Dan Penyelidikan Tahun,2015)

Menurut laporan Komnas HAM, peristiwa ini menyebabkan 1 anak tewas akibat tembakan, 11 orang luka-luka, 1 mushola terbakar, dan 63 kios milik warga hancur. Akibat insiden ini, sekitar 400 warga terpaksa mengungsi, dengan sebagian besar kehilangan tempat tinggal dan usaha. Kejadian ini juga memicu respons keras dari pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat, yang menyoroti lemahnya pengelolaan kerukunan antarumat beragama di wilayah tersebut (Laporan Pemantauan Dan Penyelidikan Tahun, 2015).

Kasus Tolikara menarik perhatian luas dari berbagai media massa, yang secara intens melaporkan dan menganalisis perkembangan peristiwa tersebut. Salah satu berita yang dipublikasikan oleh Tempo.co pada 18 Juli 2015 berjudul "Rusuh Tolikara, Jokowi Minta Warga Jaga Toleransi" mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo, sebagai kepala negara saat itu, menyerukan

4 | ANALISIS KONFLIK SOSIAL DAN AGAMA DI TOLIKARA: PENDEKATAN MULTIDIMENSIONAL DALAM IMPLEMENTASI PANCASILA DAN PENYELESAIAN KONFLIK

kepada masyarakat untuk menjaga toleransi antarumat beragama guna mencegah terulangnya konflik serupa. Beberapa hari kemudian, pada 21 Juli 2015, Tempo.co menerbitkan berita dengan judul "Konflik Tolikara 31 Orang diperiksa polisi" dalam berita tersebut melaporkan bahwa pihak kepolisian telah menetapkan 31 orang sebagai tersangka yang diduga menjadi provokator dalam insiden tersebut, dan mereka menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, laporan dari Kompas.com pada 11 Agustus 2015 dalam beritanya "Umat Islam dan umat Kristen di Tolikara telah mencapai kesepakatan untuk saling memaafkan" dalam unggahan berita tersebut telah mencapai kesepakatan untuk saling memaafkan, disertai dengan seruan kepada pemerintah untuk menjamin kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan, termasuk dalam mendirikan rumah ibadah. Laporan-laporan ini tidak hanya menunjukkan perkembangan penyelesaian konflik, tetapi juga menekankan pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam memelihara kerukunan beragama serta menjamin hak-hak dasar setiap warga negara.

Kasus Tolikara banyak menjadi topik penelitian tentang Dinamika beragama seperti penelitian oleh Utami et al (2024) menyimpulkan berdasarkan analisis terhadap insiden Tolikara dan Manokwari, dapat disimpulkan bahwa

ketegangan dan konflik agama di Indonesia sering kali dipicu oleh faktor-faktor seperti eksklusivisme, kebijakan yang diskriminatif, dan masuknya penduduk dari berbagai daerah. Insiden-insiden ini menyoroti perlunya evaluasi ulang terhadap praktik-praktik dan kebijakan keagamaan untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan di antara berbagai komunitas agama. Seperti pernyataan Kepala Polri Jendral Badrodin Haiti yang menyatakan bahwa kasus Tolikara merupakan aksi kriminal dari adanya konflik keagamaan (religious hatred) (Azra, 2020). Penelitian lain oleh Vinkasari et al (2020) menyoroti kasus Tolikara sebagai pentingnya Toleransi Umat Beragama dalam mempertahankan kerukunan mengingat Indonesia merupakan negara besar dengan berbagai jenis budaya, adat dan kekayaan alam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh niat peneliti untuk menggali akar permasalahan konflik di Tolikara secara komprehensif dan objektif, dengan fokus pada dimensi sosial, agama, hukum, dan budaya. Peneliti meyakini bahwa kasus ini tidak hanya mencerminkan permasalahan lokal di Papua, tetapi juga menjadi cerminan kompleksitas pengelolaan keberagaman di Indonesia secara keseluruhan. Intensi utama peneliti adalah untuk memberikan kontribusi ilmiah yang dapat mendukung upaya rekonsiliasi antarumat beragama, meningkatkan dialog lintas budaya, dan memformulasikan kebijakan

berbasis nilai Pancasila guna mencegah konflik serupa di masa depan. Dengan menggali data kuantitatif dan kualitatif secara mendalam, peneliti berharap temuan ini dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil, dalam menciptakan kerukunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini membahas tiga rumusan masalah utama yaitu mengenai teori pendekatan, Implementasi sila Pancasila dan juga faktor penyebab konflik Tolikara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi teori pendekatan yang relevan dalam menganalisis kasus Tolikara, Papua, serta mengevaluasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks peristiwa tersebut guna menilai sejauh mana sila-sila Pancasila dapat menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor utama yang memicu terjadinya kasus Tolikara, baik dari aspek sosial, politik, maupun budaya, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai akar permasalahan serta pendekatan yang dapat diterapkan untuk mengatasinya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian studi literatur dengan pendekatan

Normatif empiris untuk menganalisis konflik yang terjadi di Tolikara, Papua, pada tahun 2015. Metode kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam lingkungan alaminya, tanpa melakukan manipulasi terhadap objek yang diamati. Pendekatan ini mengandalkan pengumpulan data deskriptif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif bersifat induktif dan menekankan pada makna serta sudut pandang para partisipan (Helaluddin, 2019.). Data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah, seperti artikel jurnal, buku, laporan pemerintah, serta berita dari media terpercaya, yang membahas dinamika konflik, faktor-faktor penyebab, serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan.

Kriteria seleksi diterapkan untuk memastikan hanya literatur yang relevan dengan topik penelitian yang dimasukkan, dengan fokus pada publikasi yang mengulas aspek sosial, politik, budaya, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian konflik. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi akar penyebab konflik, dinamika yang terjadi, serta hubungan antara penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyelesaian konflik. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai konflik Tolikara 2015, mendukung

pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab, dampak, dan peluang rekonsiliasi di wilayah tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendekatan Teoretis Multidimensional Kasus Tolikara

Pendekatan teoretis dalam menganalisis konflik Tolikara tahun 2015 memberikan landasan yang penting untuk memahami kompleksitas permasalahan dari berbagai perspektif sebagai berikut:

a. Teori Pluralisme Agama

Pluralisme agama menekankan penghormatan terhadap keberagaman agama sebagai elemen harmoni sosial. Abdillah (2020) menyatakan bahwa dialog lintas agama diperlukan untuk mengurangi prasangka yang memicu konflik. Dalam kasus Tolikara, kurangnya dialog antar agama mencerminkan belum optimalnya penerapan pluralisme.

b. Teori Moderasi Agama

Moderasi agama menyeimbangkan keyakinan dengan penghormatan terhadap keberagaman dan hak orang lain. Zuhdi (2021) menegaskan pentingnya toleransi dan dialog untuk mencegah ekstremisme. Kasus Tolikara menunjukkan bahwa kurangnya

moderasi agama memperburuk ketegangan antar kelompok.

c. Teori Konflik Sosial

Collier (2009) menjelaskan bahwa konflik sering muncul akibat ketimpangan distribusi sumber daya. Di Tolikara, ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik menciptakan frustrasi yang memperparah konflik. Penyelesaian membutuhkan reformasi struktural untuk keadilan sosial.

d. Teori Multikulturalisme

Multikulturalisme menekankan pengakuan terhadap keberagaman budaya. Kymlicka (1995) menyoroti pentingnya kebijakan inklusif. Kurangnya penghormatan terhadap budaya lokal Papua di Tolikara meningkatkan alienasi dan ketegangan, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sensitif.

e. Teori Keadilan Distributif

Menurut Rawls (1971), keadilan harus berpihak pada kelompok terpinggirkan. Ketidakadilan dalam pembangunan di Tolikara memperburuk rasa frustrasi masyarakat. Prinsip ini menuntut kebijakan yang lebih adil untuk masyarakat lokal.

f. Teori Demokrasi Deliberatif

Habermas (1998) menekankan dialog terbuka dan inklusif dalam pengambilan keputusan. Pendekatan represif di Tolikara

memperburuk situasi, sedangkan demokrasi deliberatif dapat menciptakan solusi konstruktif melalui dialog.

g. Teori Nasionalisme

Anderson (1983) menjelaskan nasionalisme sebagai imajinasi kolektif yang menyatukan individu. Di Papua, narasi nasional sering gagal mencakup identitas lokal, menciptakan alienasi. Pendekatan inklusif diperlukan untuk membangun solidaritas.

h. Teori Etika Normatif

Teori etika normatif menilai tindakan berdasarkan prinsip kewajiban, teleologi, dan keutamaan. Dalam kasus Tolikara, teori ini dapat mengevaluasi tindakan pihak terkait untuk memastikan solusi yang beretika dan berkeadilan.

2. Pandangan Nilai Pancasila dalam kasus Tolikara

Kasus Tolikara, Papua, pada tahun 2015 mencerminkan tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila Pertama mengamanatkan penghormatan terhadap kebebasan beragama, namun peristiwa ini menunjukkan kurangnya penerapan prinsip tersebut, dengan ketegangan

antarkelompok agama yang dipicu oleh minimnya dialog antaragama serta ketidakpercayaan di antara komunitas (Abdillah, 2020). Sila Kedua, yang menekankan keadilan dan kemanusiaan, juga menghadapi kendala dalam kasus ini, terutama karena ketimpangan sosial dan marginalisasi yang dialami masyarakat Papua. Ketidakadilan dalam distribusi pembangunan, akses terhadap layanan publik, serta alokasi sumber daya telah menciptakan rasa frustrasi yang memicu konflik sosial (Komnas HAM, 2021). Ketidaksetaraan ini menjadi akar dari ketegangan yang memperburuk hubungan antarkelompok.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum menunjukkan belum optimalnya penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Sila Kedua. Ketidakjelasan proses hukum pasca-kerusuhan memperdalam ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan dan institusi negara, yang memperparah ketegangan antarkelompok (Komnas HAM, 2021). Dari perspektif Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, ketimpangan dalam kebijakan pemerintah menjadi faktor yang memperburuk konflik. Masyarakat setempat sering merasa terabaikan dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan politik, menciptakan ketidakadilan struktural yang menjadi bahan bakar konflik (Rawls, 1971).

3. Faktor yang mempengaruhi Kasus Tolikara

Dari hasil literature review, diperoleh sejumlah temuan penting yang mencerminkan kompleksitas konflik di Tolikara. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk agama, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut adalah tabel yang merangkum hasil temuan tersebut:

Tabel 2. Faktor yang mempengaruhi Konflik Tolikara

Faktor	Temuan Utama	Penjelasan dan Sumber Literatur
Agama	Kurangnya dialog lintas agama menyebabkan meningkatnya prasangka dan ketegangan antar kelompok masyarakat Muslim dan Kristen.	Abdillah (2020), Zuhdi (2021): Pluralisme agama memerlukan komunikasi yang intensif untuk mencegah kesalahpahaman.

Sosial	Ketimpangan dalam layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, menciptakan rasa frustrasi masyarakat lokal yang merasa terpinggirkan.	Collier (2009), Komnas HAM (2021): Ketidakadilan distribusi sumber daya menciptakan ketegangan sosial.
Budaya	Alienasi budaya lokal akibat kebijakan nasional yang homogen dan kurangnya penghargaan terhadap identitas lokal.	Anderson (1983), Kymlicka (1995): Multikulturalisme mengakui pentingnya menjaga identitas lokal dalam narasi nasional.
Ekonomi	Ketimpangan ekonomi antara kelompok pendatang dan masyarakat	Rawls (1971), Collier (2009): Keadilan distributif harus mempriorit

	at lokal menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam, terutama terkait distribusi sumber daya dan kesempatan kerja.	askan kelompok rentan.
Politik	Persaingan elit politik lokal sering menggunakan isu agama dan etnis sebagai alat mobilisasi, yang justru memperburuk hubungan antar kelompok masyarakat.	Habermas (1998): Demokrasi deliberatif dapat menjadi solusi untuk mendorong dialog dan mengurangi polarisasi.
Penegakan Hukum	Lemahnya penegakan hukum yang cenderung tidak adil memperburuk	Komnas HAM (2021): Proses hukum yang lambat

	uruk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat keamanan.	dan tidak transparan meningkatkan eskalasi konflik.
Implementasi Pancasila	Nilai-nilai Pancasila, seperti pluralisme agama, keadilan sosial, dan demokrasi deliberatif, belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal dalam pengelolaan konflik di wilayah Papua.	Abdillah (2020), Habermas (1998): Implementasi Pancasila harus disertai dengan kebijakan yang inklusif dan adil.

Konflik di Tolikara merupakan persoalan multidimensi yang melibatkan faktor agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan penegakan hukum. Dalam dimensi agama, konflik ini mencerminkan kurangnya dialog antarumat beragama di Papua, sebagaimana dijelaskan dalam teori pluralisme agama (Abdillah, 2020), yang

menekankan pentingnya dialog untuk mengurangi prasangka. Ketimpangan sosial dan ekonomi, yang diuraikan dalam teori konflik sosial (Collier, 2009), memperburuk ketidakadilan antara kelompok lokal dan pendatang, serta menciptakan frustrasi terhadap pemerintah. Dimensi budaya, menurut teori multikulturalisme (Kymlicka, 1995), menunjukkan perlunya pengakuan terhadap identitas lokal masyarakat Papua yang sering terpinggirkan dalam narasi nasional. Selain itu, persaingan politik elit lokal, yang menggunakan isu agama dan etnis untuk mendapatkan dukungan, memperburuk situasi, sementara pendekatan represif dari aparat keamanan malah meningkatkan eskalasi konflik.

Penegakan hukum yang lemah, yang menurut teori etika normatif (Zuhdi, 2021) harus berlandaskan pada keadilan, menjadi faktor utama yang memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat Papua merasa terpinggirkan dari manfaat pembangunan nasional, sesuai dengan teori keadilan distributif (Rawls, 1971), yang menuntut keadilan bagi kelompok yang paling rentan. Untuk menyelesaikan konflik ini, dibutuhkan pendekatan yang holistik, mencakup dialog lintas agama, redistribusi keadilan sosial, pengakuan terhadap identitas lokal, reformasi penegakan hukum, dan implementasi nilai-nilai Pancasila

secara konsisten. Pendekatan berbasis pluralisme agama, multikulturalisme, keadilan distributif, dan demokrasi deliberatif dapat menjadi solusi yang inklusif dan berkelanjutan dalam mencegah konflik serupa di masa depan.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik di Tolikara 2015 merupakan fenomena multidimensi yang melibatkan berbagai faktor, termasuk agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan penegakan hukum yang lemah. Konflik ini mencerminkan kegagalan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, seperti pluralisme, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori pluralisme agama, moderasi, keadilan distributif, multikulturalisme, dan demokrasi deliberatif, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis dialog antar kelompok sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan menciptakan keadilan.

Faktor-faktor yang memengaruhi kasus ini antara lain ketegangan antarkelompok agama yang muncul akibat kurangnya dialog lintas agama, ketimpangan sosial dan ekonomi yang menciptakan ketidakadilan dan

frustasi, serta kesenjangan budaya dimana identitas lokal masyarakat Papua sering terabaikan dalam kebijakan pembangunan. Selain itu, persaingan politik lokal yang mengedepankan isu agama dan etnis, serta lemahnya penegakan hukum yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara, turut memperburuk situasi. Untuk mencegah konflik serupa di masa depan, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan multikultural, pemberdayaan masyarakat lokal, dan reformasi dalam sistem hukum. Dengan implementasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten dan inklusif, diharapkan tercipta kedamaian yang berkelanjutan dan hubungan antarkelompok yang lebih harmonis di Papua.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, M. (2020). *Pluralisme Agama dan Implementasinya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Azra, A. (2020). *Relevansi Islam Wasathiyah: dari Melindungi Kampus hingga Mengaktualisaasi*
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Collier, P. (2009). *Wars, Guns, and Votes: Democracy in Dangerous Places*. New York: Harper.
- Collier, P., & Hoeffler, A. (2004). *Greed and Grievance in Civil War*. *Oxford Economic Papers*, 56(4), 563–595.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Habermas, J. (1998). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Helaluddin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ihsanudin. (2015). *Umat Islam dan Umat Kristen Tolikara Sepakat Saling Memaafkan*. Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/11/1537387/Umat.Islam.dan.Umat.Kristen.Tolikara.Sepakat.Saling.Memaafkan?page=all>.
- John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press. Kesahalehan

- (I. Thaha, Ed.). Pt. Kompas Media Nusantara.
- Kleden, I. (2014). Papua dalam Bingkai NKRI: Persoalan Identitas dan Integrasi Nasional. Yogyakarta: Pustaka Papua.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia. (2015). Laporan Pemantauan dan Penyelidikan 'Kasus Kerusuhan Tolikara pada hari raya idul fitri tanggal 17 juli 2015.
- Komnas HAM. (2021). Laporan Tahunan: Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM.
- Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon Press.
- Pusat Studi Papua. (2015). Dinamika Sosial di Papua: Antara Konflik dan Perdamaian. Jayapura: Universitas Cenderawasih Press.
- Suparlan, P. (2003). Multikulturalisme di Indonesia: Sebuah Wacana Pemikiran. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Tim penulis CRCS. (2015). Tolikara, Idul Fitri 2015: Tentang Konflik Agama, Mayoritas-Minoritas dan Perjuangan Tanah Damai. crcs.ugm.ac.id.
<https://crccs.ugm.ac.id/tolikara-idul-fitri-2015-tentang-konflik-agama-mayoritas-minoritas-dan-perjuangan-tanah-damai>
- Tim Penulis Tempo.co (2015). Kerusuhan Tolikara 31 Orang diperiksa Polisi. Tempo.co <https://nasional.tempo.co/read/684808/rusuh-tolikara-papua-jokowi-minta-warga-jaga-toleransi>.
- Tim Penulis Tempo.co. (2015). Rusuh Tolikara Papua Jokowi Minta Warga Jaga Toleransi. <https://nasional.tempo.co/read/684808/rusuh-tolikara-papua-jokowi-minta-warga-jaga-toleransi>
- Utami, P. D. (2024). Dinamika Moderasi Beragama: Studi Kasus Transformatif Konflik dan Perdamaian di Papua. Jurnal Limit Multidisiplin, 1(1), 7-13.
- Vinkasari, E., Cahyani, E. T., Akbar, F. D., & Santoso, A. P. A. (2020, September). Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia Untuk Mempertahankan Kerukunan. In Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi (Vol. 1, pp. 67-67).

Zuhdi, M. (2021). Moderasi Beragama di Indonesia: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

.